



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA



DJPb
Indonesian Treasury

QUICKWINS DJPb 2022

Transformasi Kelembagaan | Pasti Lebih Baik

Capaian s.d. 28 Februari 2022

HANDAL
Handal
Digital Akadabek Loyal

**QUICKWINS**
2022
s.d. 28 Feb

No.	Quickwins	UIC	Progress s.d. 28 Feb	Perubahan Milestone
1	Automatic Business Intelligence Dashboard	Setditjen	29%	tidak
2	Digitalisasi Bantuan Sosial melalui Penyempurnaan Mekanisme Penyaluran dan Penggunaan Platform Digital	Dit. PA	10%	ada
3	Interoperabilitas Digipay pada Bank Umum	Dit. PKN & Dit. SITP	20,3%	tidak
4	Implementasi Investasi Pemerintah (Tahap II)	Dit. SMI	38,7%	tidak
5	Early Warning System: Pengukuran Kemampuan Debitur (BUMN & Pemda) Untuk Membayar Pinjaman	Dit. SMI	6,9%	tidak
6	Maturity Rating Satker BLU	Dit. PPK BLU	30%	tidak
7	Sinergi Pembinaan BLUD	Dit. PPK BLU	10%	tidak
8	Dashboard Flash Report Transaksi BUN	Dit. APK & Dit. SITP	20%	tidak
9	Simplifikasi Rekonsiliasi dengan MONSAKTI	Dit. APK & Dit. SITP	13,3%	tidak
10	Forum Koordinasi Pengelolaan Keuangan Negara (FKPKN)	Dit. SP	20%	tidak
11	Pengembangan TBD	Dit. SITP	5%	tidak
12	Elektronifikasi transaksi SAKTI	Dit. SITP	6%	Ada



Automatic Business Intelligence Dashboard

Pengertian

Penyediaan media bantu bagi pimpinan berdasarkan sumber yang dinamis terkait pengambilan keputusan/kebijakan dalam perencanaan kebutuhan, penganggaran dan penghapusan BMN serta analisis data secara otomatis terkait realisasi output dan belanjanya

Tujuan

1. Transformasi pengolahan data dari manual dan semi manual menjadi otomatis
2. Intergrasi dan penguatan sistem perencanaan yang lebih terpadu
3. Memberikan olahan data dan informasi yang menjadi bagian rekomendasi dalam pengambilan keputusan/kebijakan
4. Menyediakan Informasi strategis realisasi belanja dan kinerja pencapaian output
5. Digitalisasi pemetaan potensi PNBK dan virtual site gedung dan layout kantor

Dampak/Stakeholder

Instansi, pimpinan pusat dan masing-masing kantor vertikal serta para pegawai, selain itu penerima manfaat eksternal antara lain, Romadan, Rocankeu, DJA, DJKN sampai dengan Itjen

Acceptance Criteria

1. Analisis Kinerja Realisasi Belanja (Seluruh Kanver)
2. Analisis Kebutuhan Anggaran (Seluruh Kanver)
3. Forecast 5 Tahunan Kebutuhan BMN (Seluruh Kanver)
4. Forecast 5 Tahunan Penghapusan (Seluruh Kanver)
5. Pemetaan potensi PNBK (Piloting)
6. Virtual site 360 Derajat (Awal Level Kantor Pusat) (Piloting)

Keterkaitan IS / IKU

IKU Pengeloaan Aset

Unit In Charge

ES2 : Setditjen

ES3 : Kolaborasi Bagian Umum dan Bagian Keuangan



Automatic Business Intelligence Dashboard

Keterangan

1. Telah diselesaikan requirement ABID aspek BMN dan anggaran
2. Telah diselesaikan katalog referensi harga mandiri, format report setiap output dan konsep visualisasi dashboard
3. Telah dilakukan uji coba penggunaan dan pengambilan gambar virtual site 360, awal Maret akan coba mengcapture KPPN Jakarta II secara keseluruhan

Tantangan & Kendala

1. Untuk memperoleh output data analitik yang otomatis dan dinamis, data isian yang akan diinput oleh kantor vertikal sangat kompleks dengan waktu yang relatif sangat singkat (1 bulan), yaitu paska penyelesaian tahap developing (Mei) s.d. output utama ABID harus disajikan (Juni)
2. Untuk memperoleh informasi sebaran kondisi fisik bangunan berikut dengan kebutuhan pelaksanaan s.d. evaluasi penilaian efektifitas rehabilitasinya, diperlukan baseline persentase kondisi fisik berdasarkan penilaian oleh lembaga teknis (PU) yang berimplikasi terhadap penyediaan dana dan belum terstandarisasi antara satu daerah dengan daerah lainnya
3. Pengujian variable dan formula ABID

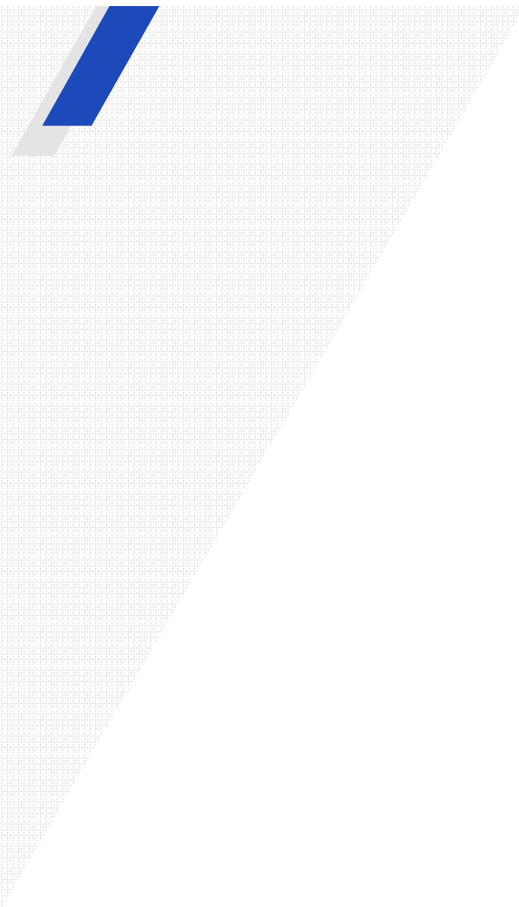
Tindak Lanjut

Dalam rangka mengejar rasionalitas target quickwins yang sebagian besar dipercepat pada semester I, terhadap tantangan/kendala tersebut akan dilakukan :

1. Paska penyelesaian penyusunan requirement, kepada kantor vertikal akan diberikan sosialisasi dan nota dinas arahan untuk melakukan inventarisasi dan menyiapkan dokumen sumber penginputan
2. Pemetaan kebutuhan dan biaya kantor vertikal dalam memperoleh penilaian dari PU
3. Berkoordinasi dengan Romadan dan lembaga teknis lainnya

Kegiatan	Target	Progr ess	Bobo t
Merumuskan langkah teknis pelaksanaan	Jan	100	5%
Interkoneksi API service	Jan-Feb	100	15%
Developing system (Dashboard Modul Utama)	Feb-Jun	20	25%
Developing system (Output Pendukung)	Feb- Nov	20	20%
Roadmap kebutuhan, anggaran dan penghapusan 5 tahunan	Jun	-	10%
Piloting pemetaan potensi PNPB atas objek optimalisasi dan Piloting virtual site gedung kantor vertikal	Jun-Des	-	15%
Merumuskan kebijakan teknis standarisasi kebutuhan dan masa manfaat BMN di lingkungan Ditjen Perbendaharaan	Des	-	10%
		29%	100%

CAPAIAN : 29%





Digitalisasi Bantuan Sosial melalui Penyempurnaan Mekanisme Penyaluran dan Penggunaan Platform Digital

Pengertian

Digitalisasi penyaluran bantuan sosial merupakan modernisasi penyaluran bantuan sosial melalui kanal digital platform untuk mewujudkan penyaluran bantuan sosial yang lebih efisien, tepat sasaran, tepat jumlah, tepat waktu, tepat kualitas, dan tepat administrasi. Kanal digital platform dengan memanfaatkan teknologi QRIS dan biometric yang terintegrasi dengan data NIK dalam penyaluran bantuan sosial, dapat memperluas cakupan penerima bantuan sosial dan opsi saluran pembayaran kepada penerima.

Tujuan

1. Penyaluran bantuan sosial yang lebih efisien, tepat sasaran, tepat jumlah, tepat waktu, tepat kualitas, dan tepat administrasi,
2. Time and cost saving melalui simplifikasi proses bisnis terkait administrasi penyaluran bansos.
3. Memperluas cakupan penerima bantuan sosial dan menambah opsi saluran pembayaran kepada penerima.
4. Meningkatkan efisiensi penyaluran bantuan sosial tanpa mengurangi sisi akuntabilitas penyaluran bantuan sosial.
5. Meningkatkan kualitas pelayanan Satker pengelola bantuan sosial kepada masyarakat.

Dampak/Stakeholder

Dampak dari penambahan kanal penyaluran bantuan sosial ini akan dirasakan oleh:

- Seluruh penerima bantuan sosial secara nasional.
- Kementerian/Lembaga penyalur bantuan sosial
- Kementerian Keuangan
- Perbankan dan lembaga keuangan non bank yang bergerak di fintech

Acceptance Criteria

1. Penyusunan kajian terkait implementasi Penyaluran Bantuan Sosial melalui kanal Platform Digital.
2. Penyusunan peraturan Penyaluran Bantuan Sosial melalui kanal Platform Digital.
3. Sosialisasi peraturan Penyaluran Bantuan Sosial melalui Platform Digital.
4. Survey Kesiapan Penyaluran Bansos Melalui Platform Digital pada Kemensos, Himbara, dan penerima bantuan sosial.

Keterkaitan IS / IKU

Mendukung inisiatif strategis program transformasi kelembagaan berupa – IS Simplifikasi Pelaksanaan Anggaran Melalui Penggunaan Teknologi Digital (*Shared Service* dan *Government Platform*), serta merupakan bagian dari komponen yang mendukung **IKU** Indeks implementasi kebijakan peningkatan efisiensi & efektifitas Pelaksanaan Anggaran

Unit In Charge

Dit. PA – Subdit Pelaksanaan Anggaran II dan Subdit APPA



Digitalisasi Bantuan Sosial melalui Penyempurnaan Mekanisme Penyaluran dan Penggunaan Platform Digital

Keterangan

- Pembentukan Tim Digitalisasi Bantuan Sosial Melalui Penyempurnaan Mekanisme Penyaluran Dan Penggunaan Platform Digital Tahun Anggaran 2022 (Keputusan Direktur Pelaksanaan Anggaran No.KEP-3/PB.2/2022).
- Rapat PAK Kementerian Keuangan pada tanggal 11 Januari 2022 dan penyampaian matriks usulan Rancangan Perpres kepada Kemenko PMK (surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-3/PB/PB.2/2022)
- Rapat internal Subdit PA 2 dan Pejabat Fungsional tanggal 22 dan 24 Februari 2022 membahas pemetaan proses bisnis penyaluran Bansos melalui kanal platform digital dan persiapan penyusunan kajian perlindungan*

Tantangan & Kendala

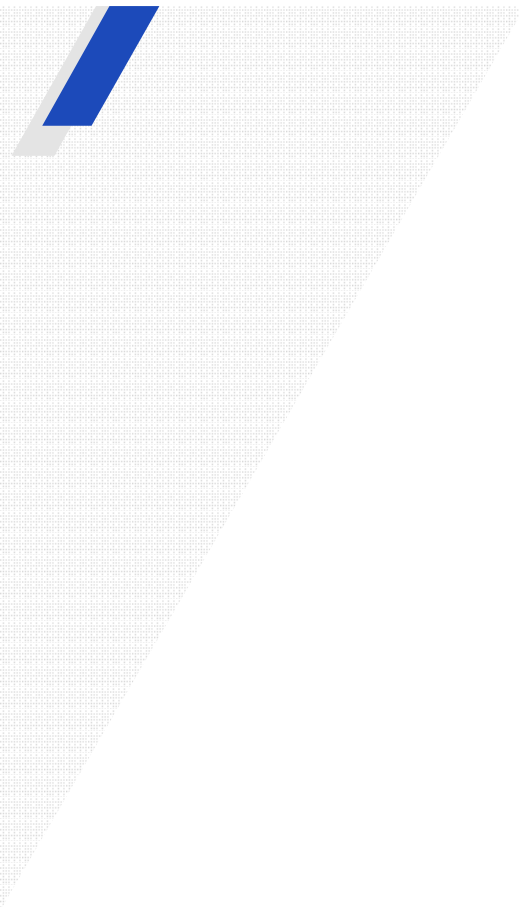
Payung hukum Rancangan Peraturan Presiden tentang Bantuan Sosial Non Tunai masih dalam proses pembahasan oleh Tim Antar Kementerian

Tindak Lanjut

- Koordinasi antar stakeholder untuk mempercepat penyelesaian perubahan Perpres 63 tahun 2017
- Rapat internal Kemenkeu untuk memberikan usulan percepatan penyelesaian perubahan Perpres 63 tahun 2017
- Pengumpulan kajian dan literasi Bansos dan pembahasan metodologi yang akan digunakan
- Rapat dengan BI dan OJK untuk mendapat masukan

Kegiatan	Target	Progress	Bobot
Pembentukan tim penyaluran bansos melalui kanal platform digital	Jan	100%	5%
Pemetaan proses bisnis penyaluran bansos melalui kanal platform digital	Feb-Maret	50%	10%
Studi literasi penyaluran bansos melalui kanal platform digital	April	...	15%
Pembahasan penyaluran bansos melalui kanal platform digital lingkup internal DJPb	Mei-Jun	...	20%
Pembahasan penyaluran bansos melalui kanal platform digital lingkup eksternal DJPb	Jul-Sept	...	25%
Pengaturan mekanisme penyaluran bansos melalui kanal platform digital	Okt	...	15%
Sosialisasi Peraturan	Nov-Des	...	5%
Survey Kesiapan Penyaluran Bansos Melalui Platform Digital pada Kemensos	Nov-Des	...	5%
		10%	100%

CAPAIAN : 10%





Interoperabilitas Digipay pada Bank Umum

Pengertian

Interoperabilitas Digipay pada bank umum adalah peningkatan kapasitas/kemampuan Digipay dalam rangka memfasilitasi adanya transaksi antar rekening satker dan vendor penyedia barang/jasa yang berbeda bank, serta interkoneksi dengan berbagai platform yang ada di internal maupun eksternal Kemenkeu.

Tujuan

Interoperabilitas Digipay dilakukan untuk meningkatkan kapasitas/ kemampuan platform dalam rangka akselerasi dan perluasan penggunaan Digipay

Dampak/Stakeholder

Interoperabilitas Digipay berdampak sebagai berikut:

- Perluasan cakupan layanan Digipay yang memerlukan adanya penyusunan regulasi dan proses bisnis sekaligus pengembangan aplikasi oleh DJPb
- Penyiapan sistem pembayaran oleh perbankan sebagai fasilitator
- Adanya potensi peningkatan penyediaan barang/jasa (supply) yang harus disiapkan vendor untuk memenuhi peningkatan permintaan akibat perluasan pengguna Digipay
- Adanya biaya (MDR) dalam penggunaan KKP pada Digipay Satu yang harus ditanggung vendor, tidak bisa dibebankan pada APBN
- Adanya biaya yang timbul ketika pembayaran lintas bank
- Adanya biaya MDR yang timbul terkait dengan penggunaan KKP

Acceptance Criteria

1. Penyelesaian revisi/pengganti Perdirjen Nomor 20/PB/2019
2. Penyelesaian sistem pembayaran Digipay Satu
3. Penyelesaian Aplikasi Digipay Satu
4. Pelaksanaan Sosialisasi/Bimtek/FGD Digipay Satu
5. Interkoneksi SAKTI
6. Monitoring dan Evaluasi Digipay

Keterkaitan IS / IKU

Digipay menjadi bagian dari IS RBTK. Salah satu Work Breakdown Structure Rencana Kerja Inisiatif Strategis **Simplifikasi Pelaksanaan Anggaran Melalui Penggunaan Teknologi Digital** (Platform Pembayaran Pemerintah) terkait dengan beberapa tahapan pengembangan Digipay Satu, antara lain penyusunan regulasi, pengembangan aplikasi Digipay Satu, Interkoneksi Digipay Satu dengan aplikasi SAKTI, dan interkoneksi dengan aplikasi Bela Pengadaan.

Interoperabilitas Digipay merupakan salah satu upaya dalam rangka pencapaian IKU **Kemenkeu Wide-One "Digitalisasi Pengelolaan Kas Negara"**. IKU tersebut salah satunya mengukur capaian jumlah satker, vendor, dan transaksi dalam Digipay. Capaian tersebut akan meningkat jika Digipay sudah dapat digunakan oleh seluruh satker dan vendor, tanpa terkendala isu rekening (interoperabilitas)

Unit In Charge

ES2 : Dit. PKN & Dit SITP
ES3 : Subdirektorat MPPK



Interoperabilitas Digipay pada Bank Umum

Dit. PKN (45%)

Kegiatan (PKN) (45%)	Target	Progress	Bobot
Penyelesaian revisi/pengganti PER-20 /PB/2019	Des	50%	45%
Pelaksanaan Sosialisasi/Bimtek/FGD Digipay Satu	Jul-Des	...	15%
Monitoring dan Evaluasi Semester I	Jul	...	20%
Monitoring dan Evaluasi Semester II	Des	...	20%
		22,5%	100%

Dit. SITP (55%)

Kegiatan (SITP) (55%)	Target	Progress	Bobot
Penyelesaian sistem pembayaran Digipay Satu	Jun	75%	27%
Penyelesaian Aplikasi Digipay Satu	Des	...	36%
Pelaksanaan Sosialisasi/Bimtek/FGD Digipay Satu	Jul-Des	...	10%
Interkoneksi SAKTI	Des	...	27%
		20,25%	100%

CAPAIAN : 20,3%



Interoperabilitas Digipay pada Bank Umum

Dit. PKN

Keterangan

Sampai dengan Februari 2022, Subdit MPPK masih fokus pada pembahasan regulasi pengganti Per-20/PB/2019 dengan Dit. SP, Dit. SITP dan Setiditjen. Selain itu pembahasan dengan Dit. Pajak terkait dasar pengenaan pajak pada pembelanjaan online.

Tantangan & Kendala

- Faktor non teknis: Beberapa isu lebih mudah dibahas melalui pertemuan secara luring (offline). Namun, kasus pandemi COVID-19 yang kembali meningkat menyulitkan penjadwalan pertemuan secara offline.
- Faktor teknis:
 - Solusi untuk menyelesaikan permasalahan payment gateway masih belum fixed. Isu utama adalah terkait dengan biaya yang mungkin timbul dari penggunaan payment gateway tersebut dan bagaimana regulasi serta mekanisme pembebanan atas biaya tersebut.
 - Pengenaan pembayaran pajak pada aplikasi Digipay masih harus menunggu peraturan pajak terbaru yang sedang disusun Dit. Pajak

Tindak Lanjut

Rencana kegiatan pada bulan Maret 2022 adalah pembahasan lanjutan baik terkait regulasi pengganti Per-20/PB/2019 serta beberapa isu terkait penggunaan payment gateway, pengenaan pajak dan penyempurnaan mock up aplikasi yang akan dilakukan dengan rapat baik secara daring maupun hybrid.

Dit. SITP

Keterangan

Satu Digipay memiliki 2 modul besar yaitu Modul administrasi dan Modul Belanja. Modul-modul tersebut, semuanya sudah dikembangkan dan menunggu review probis dan kemudian diuji internal (kecuali payment, encumbrance, dan reporting)

Tantangan & Kendala

- Untuk payment masih menunggu diskusi dengan perbankan terkait kemungkinan interkoneksi pembayaran KKP menggunakan payment gateway dari masing-masing himbara
- Untuk encumbrance sedang dijadwalkan diskusi dengan SAKTI mengenai interkoneksi Satu Digipay dengan SAKTI terkait pembebanan
- Untuk reporting sudah dijadwalkan diskusi dengan himbara dan probis mengenai format laporan yang diperlukan

Tindak Lanjut

Berkordinasi lebih lanjut dengan Dit PKN.



Implementasi Investasi Pemerintah (Tahap II)

Pengertian

Tahun 2022 merupakan tahun kedua kelanjutan implementasi Investasi Pemerintah dimana terdapat beberapa target yang akan dicapai antara lain pengajuan usulan anggaran dana investasi pemerintah BUN TA 2023, pengembangan system IT Investasi, penetapan BLU Pengelola Dana sebagai OIP.

Tujuan

Terbentuk ekosistem Investasi Pemerintah yang semakin berkembang dan mampu mendukung pemulihan serta pertumbuhan ekonomi Indonesia

Dampak/Stakeholder

Kementerian Keuangan/BUMN dan BUMD/Pemda/Kementerian Lainnya/BLU lainnya

Acceptance Criteria (agar di detilkan di timeframe)

- Penetapan anggota KIP, Tim Task Force, dan UKP
- Penunjukkan BLU Pengelola Dana sebagai OIP
- Penetapan PKIP
- Terwujudnya sistem informasi untuk investasi pemerintah ke BP Tapera berupa APLIKASI

Keterkaitan IS / IKU

IKU - Indeks Efektivitas Investasi Pemerintah (Kemenkeu-Wide Tahun 2022)

Unit In Charge

Subdit. BUMN, Subdit. IPB, Subdit. PPKRI, Subdit. KIHK, Subdit. KPIL, Subdit. Hukum; Dit. SMI dan KPPN Khusus Investasi



Implementasi Investasi Pemerintah (Tahap II)

Keterangan

Kegiatan Bulan Pebruari 2022

1. Pengusulan pendanaan Satker KIP telah disampaikan ke Sekjen Kemenkeu melalui ND Nomor 83/PB/2022. Secara paralel telah diajukan pula usulan informasi kinerja anggaran satker KIP ke Rocankeu melalui ND nomor 24/PB/PB.1/2022 dan usulan KPA Satker KIP melalui ND nomor 750/PB.1/2022
2. Pengusulan alokasi anggaran investasi pemerintah telah diajukan ke DJKN melalui ND-62/PB/2022 dan telah mendapatkan tanggapan dari DJKN melalui ND-131/KN/2022 yang intinya agar alokasi kebutuhan dana investasi mendapatkan persetujuan KIP terlebih dahulu.
3. Telah ditetapkan KMK No 29/KMK.05/2022 tentang Pembentukan dan Penetapan Keanggotaan KIP dengan masa kerja KIP dari 1 Januari 2022 s.d 31 Desember 2024. Anggota KIP terdiri dari Dirjen PB sbg Ketua dan anggota, Sesjen, Dirjen anggaran, Dirjen KN, Dirjen PPR, dan Irjen)
4. Keanggotaan Task Force KIP telah ditetapkan melalui Keputusan Ketua KIP Nomor KEP-1/KIP/2022 dan Keanggotaan Unit Kerja Pembantu (UKP) telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur SMI Nomor KEP-12/PB.4/2022.
5. Peraturan terkait mekanisme pelaksanaan penyaluran dan penyetoran dana investasi pemerintah melalui RIBUN telah ditetapkan dengan Perdirjen nomor PER-3/PB/2022 tentang Tata Kelola Rekening Investasi Bendahara Umum Negara.
6. Pelaksanaan pelatihan Legal Drafting dan Project Management dalam rangka pengembangan SDM Direktorat SMI telah dilaksanakan bulan Pebruari

Tantangan & Kendala

Pengusulan alokasi kebutuhan dana investasi pemerintah non permanen masih harus mendapatkan persetujuan KIP terlebih dahulu sebelum diajukan Kembali ke DJKN.

Tindak Lanjut

Untuk mendapatkan persetujuan KIP atas alokasi kebutuhan dana investasi non permanen, maka akan diagendakan pembahasan alokasi kebutuhan dana dimaksud dengan anggota Task Force sebelum dilakukan pembahasan/persetujuan KIP.

Kegiatan	Target	Progres	Bobot
Pengusulan Alokasi Anggaran Operasionalisasi KIP	Jan - Mar	67%	10%
Pengusulan Alokasi Anggaran Investasi Pemerintah Non Permanen	Peb - Mar	50%	10%
Penetapan infrastruktur pendukung pelaksanaan Investasi Pemerintah non Permanen sesuai mekanisme APBN (penetapan KPA, DIPA dan Pencairan Dana Investasi)	Jan - Des		10%
Penetapan Keanggotaan KIP, Tim Task Force, Unit Kerja Pembantu (UKP)	Jan - Mar	100%	15%
Penetapan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Tata Kelola RIBUN	Jan - Apr	100%	10%
Penunjukan Operator Investasi Pemerintah (OIP) BLU Pengelola Dana	Mar - Mei		10%
Penetapan Pernyataan Kebijakan Investasi Pemerintah (PKIP)	Mei - Jun		10%
Pengembangan <i>Blueprint IT</i> Terintegrasi	Jan - Des		15%
Pengembangan SDM	Jan - Des	20%	10%
		38,7%	100%

CAPAIAN : 38,7%





EARLY WARNING SYSTEM: PENGUKURAN KEMAMPUAN DEBITUR (BUMN & PEMDA) UNTUK MEMBAYAR PINJAMAN

Pengertian

- Untuk meningkatkan tata kelola penerusan pinjaman khususnya untuk mendeteksi sejak dini kemungkinan gagal bayar debitur, Direktorat SMI bermaksud membangun model prediksi untuk mengukur kemampuan bayar debitur sebagai upaya dalam menangkap tanda-tanda kesulitan keuangan debitur dan upaya preventif atas kemungkinan kegagalan bayar (early warning system).

Tujuan

Mengukur kemampuan membayar debitur sebagai early warning system mencegah terjadinya kegagalan bayar.

Dampak/Stakeholder

Melalui EWS Direktorat SMI diharapkan memiliki cukup waktu dalam memformulasi strategi untuk mencegah terjadinya piutang negara yang berkualitas kurang lancar ataupun macet. Sehingga penerimaan kembali pokok pinjaman dan bunga pinjaman dari debitur dapat dioptimalkan di masa mendatang.

Acceptance Criteria

- Dilaksanakan penyempurnaan metodologi penilaian dan model statistik yang digunakan dalam EWS
- Data Collecting and Analytics
- Penyusunan modul penilaian EWS
- Sosialisasi Modul Penilaian EWS
- Penyusunan Kajian Hasil Implementasi EWS
- Penyusunan rekomendasi kepada pimpinan atas debitur setelah dilaksanakan EWS

Keterkaitan IS / IKU

Terkait dengan IS Tema Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Pembiayaan yang Akuntabel dan Produktif dengan Risiko yang Terkendali / Indeks Efektivitas Investasi Pemerintah

Unit In Charge

Direktorat SMI - Subdirektorat IBUMN dan IPB



EARLY WARNING SYSTEM: PENGUKURAN KEMAMPUAN DEBITUR (BUMN & PEMDA) UNTUK MEMBAYAR PINJAMAN

Keterangan

Kegiatan Bulan Pebruari

1. Telah dilakukan pembahasan internal untuk pembagian tugas pelaksanaan penyempurnaan metodologi dan model statistic yang digunakan dalam EWS.
2. Dalam rangka pengumpulan data resource, Direktorat SMI telah menyampaikan permintaan data Laporan Keuangan Pemda 10 Tahun terakhir kepada Direktorat APK melalui Nota Dinas Nomor ND-167/PB.45/2022.
3. Direktorat APK telah menyampaikan data Laporan Keuangan Pemda untuk tahun 2011 s.d 2020 melalui nota dinas nomor ND-26/PB.66/2022 sebagai data dukung yang akan dianalisa untuk penyempurnaan metodologi EWS.

Tantangan & Kendala

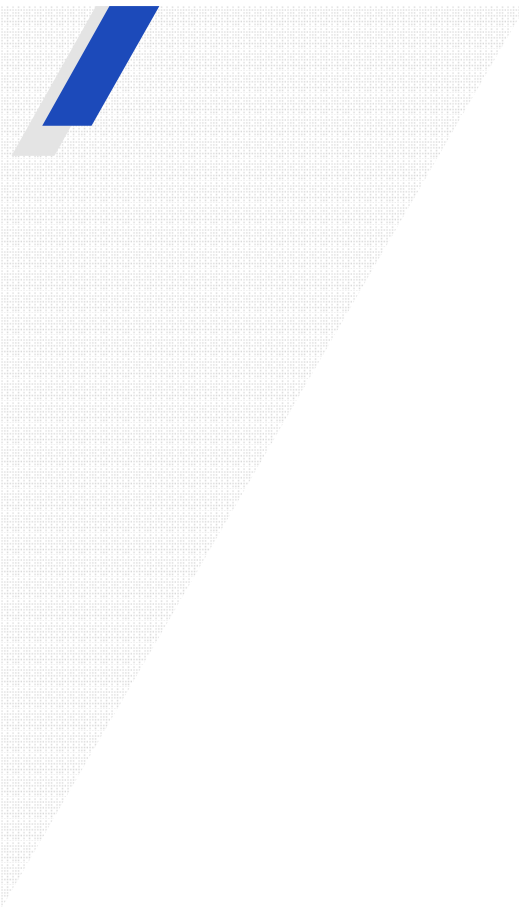
-

Tindak Lanjut

-

Kegiatan	Target	Progress	Bobot
Penyempurnaan metodologi penilaian dan model statistik yang digunakan dalam EWS	Jan - Mei	12,5%	25%
<i>Data Collecting and Analytics</i>	Jan - Sep	37,5%	10%
Penyusunan modul penilaian EWS	Jun - Jul		15%
Sosialisasi modul penilaian EWS	Agt		10%
Penyusunan kajian hasil implementasi EWS	Sep – Nov		20%
Penyusunan rekomendasi kepada pimpinan atas debitur setelah dilaksanakan EWS	Des		20%
		6,9%	100%

CAPAIAN : 6,9%





Maturity Rating Satker BLU

Pengertian

BLU Maturity Rating Assessment Tools and Evaluation disusun sebagai perangkat bagi PPKBLU maupun BLU untuk mengukur tingkat maturitas tatakelola BLU pada seluruh aspek organisasi secara komprehensif dan end-to-end, di mana tools ini bersifat dinamis dan dapat disesuaikan dengan kondisi serta target pada tahun yang bersangkutan.

Tujuan

1. Memperoleh gambaran yang komprehensif atas kondisi BLU (strength dan area of improvement) dalam hal tatakelola (keuangan, layanan, kapabilitas internal, inovasi, lingkungan) masing-masing BLU yang selama ini belum terpotret dari monev.
2. Peningkatan tatakelola BLU secara berkelanjutan.
3. Peningkatan kapabilitas dan tatakelola dari Satker BLU

Acceptance Criteria

1. Seluruh Satker BLU telah menggunakan Maturity Rating Assessment Tools pada tahun 2022
2. Seluruh Kantor Wilayah DJPB telah melakukan Validasi Hasil Self Assessment Maturity Rating BLU.
3. terselesaikannya validasi oleh Dit PPK BLU

Dampak/Stakeholder

1. Meningkatnya tata Kelola BLU secara berkelanjutan melalui turunan area of improvement masing-masing BLU kedalam KPI BLU.
2. Meningkatkan kualitas layanan BLU kepada masyarakat seiring semakin mature-nya tatakelola Satker BLU.

Stakeholder atau pihak terdampak:

1. Satker BLU sebagai pihak yang melakukan dan KL nya pembina teknisnya.
2. Ditjen Perbendaharaan dan Kemenkeu sebagai pembina keuangan.
3. Masyarakat sebagai penerima layanan Satker BLU

Keterkaitan IS / IKU

Mendukung IKU K1 yaitu Implementasi Maturity Rating pada Sasaran-Program internal process-pencapaian tugas khusus yang optimal dan efektif

Unit In Charge:

Subdit PST

Unit Involvement:

Subdit PK 1, Subdit PK 2, Subdit PK 3, dan Bidang PA I Kanwil DJPB, 254 Satker BLU



Maturity Rating Satker BLU

Keterangan

1. Evaluasi Hasil Piloting MR
2. Pengayaan Tools MR
3. Penyusunan IKU Implementasi MR Wilayah
4. Peningkatan Kapasitas validator Pusat dan Daerah telah dilaksanakan secara daring pada tanggal 23,24 Februari 2022

Tantangan & Kendala

Tindak Lanjut

Kegiatan	Target	Progress	Bobot
Evaluasi Hasil Piloting	Jan	100%	5%
Pengayaan tools Maturity Rating	Jan-Feb	100%	5%
Penyusunan IKU Implementasi Maturity Rating Wilayah	Jan	100%	5%
Peningkatan Kapasitas validator Pusat (Pembina BLU) dan daerah (Pegawai Kanwil DJPB)	Feb	100%	15%
Sosialisasi Penilaian Kinerja BLU menggunakan Maturity Rating kepada BLU	Feb-Mar		20%
Pelaksanaan Self Aessment Penilaian Kinerja Layanan	Mar-Mei		15%
Pelaksanaan Self Aessment Penilaian Kinerja Keuangan	Mei-Jul		20%
Validasi Hasil Aessment oleh Kanwil DJPB	Jun-Agu		10%
Verifikasi dan penilaian final hasil self assessment	Agu-Nov		15%
Laporan dan Evaluasi	Des		5%
		30%	100%

CAPAIAN : 30%





Sinergi Pembinaan BLUD

Pengertian

Sesuai dengan amanat memenuhi amanat UU No 1 tahun 2004 tentang pembinaan Badan Layanan Umum dimana BLUD merupakan salah satu bentuk praktek Badan Layanan Umum di Daerah, maka ranah pembinaannya ada pada Kementerian Keuangan terutama aspek pembinaan perbendaharaannya. Diperlukan sinergi dalam melakukan pembinaan antara Pemda, DJPB, dan Kemendagri.

Tujuan

1. Bentuk Pelaksanan Inisiatif Kemenkeu Kewilayahan yaitu *Regional Chief of Economist*
2. Inisiatif standarisasi pembinaan BLUD secara bertahap
3. Mendapatkan Data keuangan dan layanan BLUD guna bahan evaluasi
4. Sebagai perluasan Tusi pembinaan BLUD di Kanwil yang selama ini belum terlaksana dengan baik
5. Peningkatan kualitas layanan pemerintah di daerah melalui peningkatan kualitas BLUD

Dampak/Stakeholder

1. Peningkatan peran dan kehadiran DJPB di daerah
2. Rekomendasi kebijakan yang lebih akurat dan tepat sasaran baik di pusat maupun di daerah
3. Meningkatnya sinergi DJPB, Pemda, dan Kemendagri
4. Kepuasan masyarakat atas layanan pemerintah yang lebih baik

Stakeholder atau pihak yang terdampak:

1. Pemerintah Daerah
2. Kemendagri
3. Masyarakat

Acceptance Criteria

Terlaksananya Piloting Sinergi Pembinaan BLUD sebagai bagian pelaksanaan inisiatif Regional Chief of Economist (Timur, Tengah, Barat) dengan tahapan:

1. Sinergi pembinaan dengan Pemerintah Daerah dan evaluasi pelaksanaannya dengan Kemendagri
2. Standarisasi bentuk sinergi dan bentuk atau area pembinaan BLUD
3. Laporan Pembinaan Semester 1 dan Semester 2
4. Evaluasi Pembinaan BLUD dan identifikasi area of improvement dari masing-masing objek pembinaan

Keterkaitan IS / IKU

1. Mendukung Inisiatif Kemekeu Kewilayahan terutama Progra Regional Chief Economist (IS : RCE)
2. Mendukung IKU K2 indeks kualitas sinergi pembinaan BLUD pada program komunikasi, edukasi, dan standarisasi yang berkelanjutan

Unit In Charge

Dit. PPK BLU (semua subdit)

Unit Involvement

Pemda, Kemendagri, Kanwil DJPB



Sinergi BLUD

Sinergi Pembinaan BLUD

Keterangan

Panduan Pembinaan BLUD saat ini tengah disusun baik berupa petunjuk teknis maupun dasar peraturannya

Tantangan & Kendala

- Perbedaan peraturan teknis tentang pembinaan peraturan antara BLU dan BLUD
- Terdapat perbedaan tingkat komunikasi pada masing-masing Kanwil, Pemda, dan BLUD sehingga dibutuhkan Strategi komunikasi berbeda yang perlu diterapkan untuk masing-masing Kanwil

Tindak Lanjut

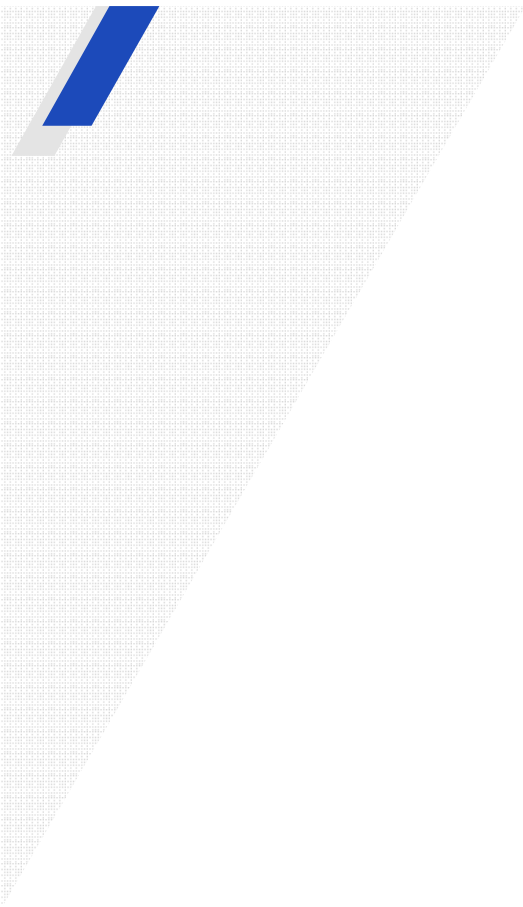
- Dit. PPK BLU mempelajari PERMENDAGRI No. 79 tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah
- Mengintensifkan komunikasi dengan masing-masing Kanwil dan Menyusun rencana komunikasi, terutama setelah melakukan identifikasi dari laporan rencana kegiatan yang disusun oleh Kanwil pada TW I

Kegiatan	Target	Progress	Bobot
Penyusunan Panduan Pembinaan BLUD	Jan-Feb	100%	5%
Peningkatan kapasitas Kantor Wilayah dalam melakukan pembinaan BLUD	Feb-Apr	100%	5%
Pedampingan Pelaksanaan Sinergi Pembinaan BLUD Kanwil Pilotting (Timur-Tengah-Barat)	Apr-Jun		5%
Periode Pelaksanaan Pendampingan Pembinaan BLUD Nasional	Jun-Jul		10%
Penyusunan Laporan Pembinaan BLUD Semester 1	Jul-Sep		5%
Evaluasi pelaksanaan implementasi pembinaan BLUD Sm. 1 (FGD dengan Kemendagri dan beberapa Pemda, dan Kanwil)	Sep		15%
Pengayaan standar format dan bentuk pembinaan dari hasil evaluasi	Sep-Okt		10%
Periode Pelaksanaan Pendampingan Pembinaan BLUD SM. 2 Nasional	Okt-Nov		10%
Penyusunan Laporan Pembinaan BLUD Semester 2	Nov		5%
Evaluasi pelaksanaan implementasi pembinaan BLUD Sm. 2 (FGD dengan Kemendagri dan beberapa Pemda, dan Kanwil)	Nov		10%
Evaluasi dan Perancangan Laporan analisis hasil pembinaan BLUD Tahunan	Nov-Des		15%

10%

100%

CAPAIAN : 10%





Dashboard Flash Report Transaksi BUN

Pengertian

Dashboard Flash Report Transaksi BUN merupakan menu atau fitur pada OMSPAN yang dapat menampilkan secara cepat laporan manajerial terkait pos-pos penting yang menjadi highlight pada LKBUN berikut diagram dan graphicnya.

Tujuan

1. Memudahkan dan mempercepat pimpinan atau manajemen dalam menyediakan data transaksi BUN untuk kepentingan pengambilan keputusan, bahan monitoring dan evaluasi serta keperluan lainnya.
2. Melengkapi fungsi Modul OMSPAN dalam menghasilkan laporan manajerial yang relevan, akurat, andal, dan cepat.

Dampak/Stakeholder

Seluruh Satker (UAKPA)/KPPN (UAKBUN-D), UAPPAW/Kanwil DJPb (UAKBUN-W), UAPPA-E1/UAKBUNP, hingga KL (UAPA)/UA BUN sebagai user, Direktorat APK sebagai Admin User, Direktorat SITP sebagai pengembang Aplikasi

Acceptance Criteria

1. Tersedianya Menu/Fitur Dashboard Flash Report Transaksi BUN pada Aplikasi Online Monitoring SPAN (OMSPAN);
2. Tersedianya Output laporan manajerial baik dalam bentuk diagram, graphic serta rincian transaksi BUN pada OMSPAN.

Keterkaitan IS / IKU

1. Mendukung IS Akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah yang akuntabel, transparan, andal, dan tepat waktu
2. Mendukung IKU Kemenkeu One dan Kemenkeu Two yakni Indeks penyelesaian LKPP dan LK-BUN (unaudited) secara tepat waktu

Unit In Charge

ES2 : Dit. APK & Dit SITP
ES3 : Subdirektorat APPKBUN



Dashboard Flash Report Transaksi BUN

Dit. APK (50%)

Kegiatan	Target	Progress	Bobot
Pembahasan awal pengembangan Dashboard Flash Report Transaksi BUN dengan Dit. SITP	Jan	100%	5%
Pengajuan User Requirement (UR) pengembangan Dashboard Flash Report Transaksi BUN ke Dit SITP	Feb	100%	15%
User Acceptance Testing (UAT) Dashboard Flash Report Transaksi BUN	Mar-Jun	...	30%
Pembahasan lanjutan pengembangan Dashboard Flash Report Transaksi BUN dengan Dit. SITP	Jul-Aug	...	20%
September sd Oktober 2022 - Finalisasi User Acceptance Testing (UAT) Dashboard Flash Report Transaksi BUN	Sep-Okt	...	20%
Deployed Dashboard Flash Report Transaksi BUN pada OMSPAN Production	Nov	...	5%
Rilis penggunaan Dashboard Flash Report Transaksi BUN	Des	...	5%
		...	100%

Dit. SITP (50%)

Kegiatan	Target	Progress	Bobot
Pembahasan awal pengembangan Dashboard Flash Report Transaksi BUN dengan Dit. SITP	Jan	100%	5%
Pengajuan User Requirement (UR) pengembangan Dashboard Flash Report Transaksi BUN ke Dit SITP	Feb	100%	15%
User Acceptance Testing (UAT) Dashboard Flash Report Transaksi BUN	Mar-Jun	...	30%
Pembahasan lanjutan pengembangan Dashboard Flash Report Transaksi BUN dengan Dit. SITP	Jul-Aug	...	20%
September sd Oktober 2022 - Finalisasi User Acceptance Testing (UAT) Dashboard Flash Report Transaksi BUN	Sep-Okt	...	20%
Deployed Dashboard Flash Report Transaksi BUN pada OMSPAN Production	Nov	...	5%
Rilis penggunaan Dashboard Flash Report Transaksi BUN	Des	...	5%
		5%	100%

CAPAIAN : 20%



Dashboard Flash Report Transaksi BUN

Dit. APK

Keterangan

Menindaklanjuti nota dinas Direktur APK nomor ND-1291/PB.6/2021 tanggal 30 Desember 2021 hal Pengembangan Menu Managerial Report BUN pada Dashboard Aplikasi Online Monitoring SPAN (OMSPAN), Dit APK telah berkoordinasi dengan Dit SITP terkait penyusunan Draft User Requirement (UR).

Tantangan & Kendala

Bersamaan dengan jadwal penyusunan LKBUN Tahun 2021 Unaudited dan menghadapi reviu Inspektorat Jenderal serta pemeriksaan oleh BPK RI atas LKBUN.

Tindak Lanjut

Koordinasi intensif secara informal dengan Dit SITP dan merencanakan ulang penyampaian UR pada periode Maret 2022

Dit. SITP

Keterangan

Telah dilakukan beberapa kali pertemuan untuk melakukan Pembahasan awal pengembangan Dashboard Flash Report Transaksi BUN dengan Dit. APK

Tantangan & Kendala

User Requirement masih disusun oleh Dit APK

Tindak Lanjut

Akan dilakukan pembahasan lebih lanjut untuk membahas user requirement dan persiapan User Acceptance Testing (UAT)



Simplifikasi Rekonsiliasi dengan MONSAKTI

Pengertian

MONSAKTI merupakan aplikasi berbasis web yang digunakan dalam pelaksanaan monitoring dan rekonsiliasi data keuangan melalui pemanfaatan integrasi fitur-fitur yang terdapat pada aplikasi e-Rekon&LK dan pengolahan data di SAKTI dan SPAN yang sistematis dan realtime.

Tujuan

Proses digitalisasi diharapkan dapat menjadi alat bantu yang efektif dalam proses penyusunan laporan keuangan yang lebih akurat dan andal serta memudahkan dalam hal pengawasan dan pengendalian internal secara lebih dini

Dampak/Stakeholder

- Dapat melakukan pengawasan dan pengendalian internal dalam hal menganalisa hasil rekonsiliasi antara data SAI dan SiAP yang dilakukan pada MONSAKTI dan dapat dilakukan lebih cepat (day to day) karena SAKTI berinterface ke SPAN pada setiap siklus anggaran secara realtime
- Memudahkan dalam memonitoring proses penyusunan data laporan keuangan maupun laporan BMN secara realtime sehingga dapat mendukung analisa, perbaikan dan pengambilan keputusan.
- Stakeholder pengguna MONSAKTI ini antara lain K/L (UAKPA, UAPPA-W, UAPPA Es1, UAPA), APIP, BPK, Pembina KL baik BMN maupun Keuangan dan BUN.

Acceptance Criteria

- Adanya dukungan proses digitalisasi pada system penyusunan laporan keuangan berbasis web.
- Implementasi fitur yang telah ada pada e-Rekon&LK (fitur/menu yang berfungsi sebagai analisa laporan keuangan), antara lain melalui menu monitoring dan menu Profil Kualitas LK yang ada pada e-Rekon&LK dapat dimonitoring juga oleh user MONSAKTI
- Tersedianya fitur/menu monitoring dan rekonsiliasi pada MONSAKTI, paling sedikit memuat:
 - Monitoring TDK Keuangan
 - Monitoring BMN (rekonsiliasi internal)
 - Monitoring TK/TM
 - Validasi daftar (kesesuaian persamaan dasar akuntansi)
 - Validasi BMN
 - Status pelaksanaan rekonsiliasi (status BAR)

Keterkaitan IS / IKU

Akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah yang akuntabel, transparan, andal, dan tepat waktu.

Unit In Charge

ES2 : Dit. APK & Dit SITP
ES3 : Subdirektorat Sistem Akuntansi



Simplifikasi Rekonsiliasi dengan MONSAKTI

Dit. APK (50%)

Kegiatan	Target	Progress	Bobot
Pembahasan dan penyusunan <i>User Requirement</i> (UR) pengembangan MONSAKTI dalam rangka simplifikasi rekonsiliasi	Jan – Feb	100%	20%
<i>User Acceptance Test</i> (UAT) aplikasi	Apr – Jun		20%
Pelaksanaan FGD atau sosialisasi	Jun		10%
Implementasi rekonsiliasi dengan MONSAKTI (tahap I). Fitur/menu yang akan disediakan: <ul style="list-style-type: none"> ⬇ Status pelaksanaan rekonsiliasi ⬇ Monitoring TDK Keuangan ⬇ Monitoring BMN (rekonsiliasi internal) ⬇ Monitoring TK/TM 	Jul		10%
Evaluasi, pengembangan lanjutan, dan <i>User Acceptance Test</i> (UAT)	Jul – Nov		20%
Pelaksanaan sosialisasi	Nov		10%
Implementasi rekonsiliasi dengan MONSAKTI (tahap II) Fitur/menu yang akan disediakan: <ul style="list-style-type: none"> ⬇ Validasi daftar (kesesuaian persamaan dasar akuntansi) ⬇ Validasi BMN (monitoring data BMN tidak normal) ⬇ Monitoring ketidaksesuaian akun belanja ⬇ Monitoring transaksi yang belum tuntas ⬇ Daftar rincian data keuangan dan BMN 	Des		10%
		20%	100%

Dit. SITP (50%)

Kegiatan	Target	Progress	Bobot
Pembahasan MONSAKTI dalam rangka simplifikasi rekonsiliasi	Jan – Feb	60%	10%
Pengembangan aplikasi	Apr – Jun		30%
Pelaksanaan FGD atau sosialisasi	Jun		10%
Implementasi rekonsiliasi dengan MONSAKTI (tahap I) Fitur/menu yang akan disediakan: <ul style="list-style-type: none"> • Monitoring TDK Keuangan • Monitoring BMN (rekonsiliasi internal) • Monitoring TK/TM 	Jul		10%
Evaluasi dan pengembangan lanjutan	Jul – Nov		20%
Pelaksanaan sosialisasi	Nov		10%
Implementasi rekonsiliasi dengan MONSAKTI (tahap II) Fitur/menu yang akan disediakan: <ul style="list-style-type: none"> • Validasi daftar (kesesuaian persamaan dasar akuntansi) • Validasi BMN • Status pelaksanaan rekonsiliasi (status BAR) 	Des		10%
		6%	100%

CAPAIAN : 13,3%



Simplifikasi Rekonsiliasi dengan MONSAKTI

Dit. APK

Keterangan

Progress atas penyusunan UR serta pembahasan/koordinasi secara informal dgn Dit SITP sampai dengan periode Februari 2022 adalah 100%

Tantangan & Kendala

memetakan kebutuhan fitur pada MONSAKTI terkait proses rekonsiliasi data SAI dan SIAP, serta kebijakan atas penerbitan BAR hasil rekonsiliasi

Tindak Lanjut

1. Mempertimbangkan prinsip simplifikasi fitur dan kemudahan penggunaan fitur terkait rekonsiliasi pada MONSAKTI
2. Mengadopsi fitur yang ada pada e-rekon dgn mengelompokan berdasarkan jenis kebutuhan monitoring transaksi
3. Pengambilan opsi kebijakan rekonsiliasi dengan penerapan rekonsiliasi data melalui MONSAKTI

Dit. SITP

Keterangan

Telah dilaksanakan rapat pendahuluan dengan Dit. APK, untuk membahas UR

Tantangan & Kendala

Tindak Lanjut



Forum Koordinasi Pengelolaan Keuangan Negara (FKPKN)

Pengertian

Forum Koordinasi Pengelolaan Keuangan Negara (FKPKN) adalah wadah koordinasi, komunikasi, konsultasi, supervisi dan sharing data informasi terkait lingkup pengelolaan keuangan negara dan regulasinya.

Tujuan

Mendukung peran RCE dalam:

1. Menyampaikan kebijakan-kebijakan pemerintah pusat;
2. Mengharmonisasi kebijakan pemerintah pusat dan daerah;
3. Memperkuat sinergi kelembagaan dan peran Kemenkeu di daerah;
4. Memberikan pendampingan dan asistensi kepada pemda;
5. Meningkatkan kapasitas SDM Pengelola Keuangan Negara.

Dampak/Stakeholder

Unit Eselon I Kemenkeu, Pemerintah Daerah, BPKP, BPS, Bi, OJK, Perguruan Tinggi/Akademisi, Kementerian /Lembaga terkait lainnya.

Acceptance Criteria

1. Terbentuknya FKPKN di seluruh Provinsi
2. Adanya Pedoman Pelaksanaan FKPKN
3. Penyusunan Laporan Pelaksanaan FKPKN di daerah
4. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan FKPKN

Keterkaitan IS / IKU

Inisiatif Strategis Penguatan RCE dalam rangka Kestinambungan Fiskal Berbasis Kewilayahan

Unit In Charge

Direktorat SP - Subdirektorat Penelitian dan Pengembangan dan Kerja Sama Kelembagaan



Forum Koordinasi Pengelolaan Keuangan Negara (FKPKN)

Capaian

1. Memberikan masukan/reviu atas Draft RKMK IS RCE
2. Penyusunan Draft KMK pembentukan FKPKN tingkat daerah
3. Pembahasan FKPKN di Rapat Koordinasi Pimpinan Terbatas dengan Seluruh Kanwil Ditjen Perbendaharaan
4. Pelaksanaan rapat koordinasi dengan Direktorat SMI mengenai sinergi pemberdayaan UMKM melalui FKPKN

Tantangan & Kendala

Penetapan kelembagaan FKPKN baik di tingkat pusat dan tingkat daerah membutuhkan koordinasi lintas instansi sehingga membutuhkan waktu dalam proses penetapannya.

Tindak Lanjut

1. Melakukan koordinasi dengan Setditjen dan Direktorat Teknis untuk harmonisasi dan sinkronisasi program dan kegiatan RCE melalui FKPKN
2. Melakukan koordinasi dengan PMO dan CTO untuk sinkronisasi IS RCE dan UMKM
3. Melakukan koordinasi teknis dengan seluruh Kanwil Ditjen Perbendaharaan terkait pembentukan dan pelaksanaan FKPKN di tingkat daerah

Keterangan	Target	Progress	Bobot
Koordinasi Pembentukan FKPKN dengan seluruh Kanwil Ditjen Perbendaharaan	Jan-Feb	100%	10%
Pembentukan FKPKN di seluruh Provinsi	Feb-Mar		30%
Penyusunan Pedoman Pelaksanaan FKPKN	Jan - Mar	100%	10%
Pelaksanaan Kegiatan FKPKN	Jan - Des	...	30%
Penyusunan Laporan Pelaksanaan FKPKN	Jan - Des	...	10%
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan FKPKN	Jan - Des	...	10%
		20%	100%

CAPAIAN : 20%





Pengembangan Treasury Big Data (TBD)

Pengertian

Pengembangan TBD (Treasury Big Data) adalah pembangunan sistem yang dapat mengoleksi, menyimpan, memanipulasi data secara cepat dalam bentuk multidimensi berbasis Online Analytical Processing (OLAP) untuk tujuan analisis

Tujuan

mengelola, mengolah dan menganalisis data yang dikelola dari sistem informasi pada internal Direktorat SITP maupun data yang bersumber dari eksternal dalam rangka mendukung pengambilan keputusan

Dampak/Stakeholder

TBD akan berdampak pada integrasi data sistem informasi yang dikelola oleh Dit. SITP guna membangun single source of truth data.

Stakeholder:

- Seluruh Direktorat dan Kantor Wilayah DJPb
- Unit Eselon I Kemenkeu,
- Seluruh Kementerian/Lembaga

Acceptance Criteria

- Tersedianya layanan akses data melalui mekanisme data pooling data warehouse dan data like
- Tersedianya layanan data analytics berbasis statistik dan machine learning
- Tersedianya layanan data visualisasi atas permodelan data analytics dalam bentuk business intelligence

Keterkaitan IS / IKU

IS Data Analytics Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Risiko

Unit In Charge

ES2 : Direktorat SITP

ES3 : Subdit PSII dan Subdit PSSIP



Pengembangan Treasury Big Data (TBD)

Keterangan

1. Penyiapan alokasi anggaran Pengadaan Jasa Konsultansi Pengembangan BI TBD 2022 (tersedia pada DIPA 2022 sebesar Rp2,8M)
2. Penyiapan alokasi anggaran Pengadaan software dan hardware TBD 2022 pada DIPA TA 2022
3. Koordinasi dan Sosialisasi pengembangan TBD dengan Pusintek

Tantangan & Kendala

1. Renkas perlu disinkronkan dengan realisasi anggaran untuk mengurangi potensi indikator IKPA tidak tercapai.
2. Belum ada rincian kebutuhan rill based-on KAK, sedangkan proses revisi DIPA di DJA bisa 1-2 bulan
3. POC merupakan bagian penawaran kontrak pengadaan S/H, sehingga baru dilakukan jika kontrak approved
4. POC hanya fokus ke 1 principal
5. Penetapan SC dan POKJA belum dilakukan
6. Kontrak pengembangan baru dapat dilakukan setelah kontrak pengadaan S/H

Tindak Lanjut

1. Penetapan Timeline Proyek Pengembangan TBD tahun 2022
2. Penetapan struktur Steering Committee
3. Penetapan SK Tim Kelompok Kerja TBD 2022
4. Pengajuan revisi anggaran untuk alokasi anggaran pengadaan software dan hardware TBD 2022 harus disertai ND permintaan kebutuhan dari inisiator kegiatan TBD kepada KPA/PPK Kanpus DJPb.
5. Penetapan PIC penyusun KAK Pengadaan Jasa Konsultansi Pengembangan BI TBD 2022
6. Penetapan PIC penyusun KAK Pengadaan Software dan Hardware TBD 2022

Keterangan	Target	Progress	Bobot
Benchmarking	Jan-Feb	100%	5%
POC (Proof of Concept)	Feb-Apr		20%
Penyusunan KAK & Tender	Mei-Jul		5%
Pengembangan TBD Fase 1	Jul-Nov		50%
UAT TBD	Jul-Nov		15%
Piloting Tahap 1	Des		15%
		5%	100%

CAPAIAN : 5%





Elektronifikasi Transaksi SAKTI

Pengertian

Penggunaan dokumen elektronik dalam penyampaian tagihan APBN secara non fisik melalui SAKTI dengan penggunaan Digital Signature.

Tujuan

- Peningkatan akurasi dan akuntabilitas pembayaran APBN
- Efisiensi pengajuan proses pembayaran melalui penyampaian dokumen permintaan pembayaran dari pengguna anggaran kepada BUN secara fully electronic menggunakan SAKTI

Dampak

- Perbaikan operasional pelaksanaan pembayaran APBN sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab antara pengguna anggaran dan BUN

Stakeholder:

- Seluruh satuan kerja pengguna SAKTI

Acceptance Criteria

- Piloting penggunaan dokumen elektronik dalam transaksi pembayaran APBN lingkup Satker DJPb, dan Satker K/L mitra KPPN Jakarta II sebagai target piloting
- Integrasi sistem monitoring APBN (OM SPAN - MONSAKTI)

Keterkaitan IS / IKU

IS RBTK Penerapan Platform Pembayaran Pemerintah

Unit In Charge

ES2 : Dit SITP
ES3 : Subdit PSIE



Elektronifikasi Transaksi SAKTI

Keterangan

1. Mengkomunikasikan konsep elektronifikasi SAKTI pada weekly meeting Implementasi SAKTI pada 25 Februari 2022
2. Perumusan revisi PMK-190/2012 oleh dit. PA

Tantangan & Kendala

1. Komunikasi mengenai penggunaan DS dalam transaksi SAKTI dengan unit terkait
2. Penyelesaian revisi PMK-190/2012 oleh DJPb
3. Identifikasi proses bisnis SAKTI yang menggunakan DS
4. Pengintegrasian data elektronik SAKTI-SPAN (tanpa portal) yang terenkripsi end-to-end
5. Identifikasi pengembangan SAKTI sebagai end-to-end system pengelolaan APBN

Tindak Lanjut

1. Percepatan penggunaan DS sebagai entry point elektronifikasi pembayaran APBN
2. Perlu identifikasi proses bisnis SAKTI mana yang perlu menerapkan DS sebagai dokumen elektronik yang mengesahkan transaksi elektronik sesuai UU Keuangan Negara, UU ITE, dan konsep SPBE serta mana yang bisa fully digital sebagai data elektronik
3. Kemampuan badan sertifikat e-sign (BSSN & BPPT) dalam memenuhi layanan SAKTI

Keterangan	Target	Progress	Bobot
Kajian Integrasi	Jan-Mar	30%	20%
Integrasi monsakti-OMSPAN	Mar-Jul		40%
Piloting dokumen elektronik	Jul-Okt		40%
		6%	100%

CAPAIAN : 6%





Terima kasih